

FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN MIGRASI INTERNASIONAL KE MALAYSIA

Oleh : Anggraeni Primawati*

Abstract

A push – pull model is often used to analyze the migration of people in a region (push –pull factors in Lee, 1995). Socio-economic conditions in the area of origin is seen as factor that causes people to go another area where there is a possibility to meet their needs. Therefore, the different condition between the origin and the destination areas in term of high utility value can lead to people migration. The reasons to migrate are vary among individuals. So the assessment of the origin of each individual in society is also defferent. Consequently , the decision to move away from each individual differs accordingly.

The main reason for people to migrate is because of economic disparities among regions of origin and destination (Todaro, 1979). In general, socio – economic conditions is the area of origin that is not possible to meet the needs of a person becomes primary motivation to migrate as economic motives. For Todaro, rational economic considerations, where migrant has a hope to get a job and to get high revenue in the area of origin. This decision usually occurs when people who are experiencing stress, such as domestic considerations, limited employment opportunities, limited infrastructure, educational level, the limitations of technology and communications strategy development, the limitations of the physical nature and employment opportunities in the areas of origin are relatively small. Many workers migrate to Malaysia in hopes to earn an income higher than in regions of origin.

Based on neo classical frame work of migration. It can be seen as a product of differences in wage levels of other regions. By using this frame work, the main factors underlying the process of labor migration to the area destination is the macro factors often call as factors of pull and push (Push-Pull Factors Theory) proposed by Lee.

Macro factors in the form of push and pull consists of variety of variables such as the limited job market in their area and adequate in the destination, the difference in wage levels in both regions, land ownership in the area of origin, ethnicity and familial ties, transport links between destination and origin areas, access to various facilities in the destination and the influence of political factors in areas of origin. Mitchel in Mantra (1995) revealed that the centrifugal force (which acts as a booster) and centripetal forces (factors that attract migrants to move) is an important factor influencing a person to perform the migration process. In addition poverty caused by environmental conditions that do not support adequately on economic activity also became the cause of the process of migration flows to other regions or between countries in large numbers (Lee, 1995). In other words The Theory of Need and Stress (Mantra, 1995) said some of individuals has kind of needs in the form of economic, social culture and psychological needs. If those needs are not meet in area where they lived, and there was pressure or stress on it. It could become a reason in which the great need and stress in the area of origin encourage potential migrants to leave their areas to other areas that are considered to meet their needs.

Keywords: push-pull factors, labor, migration, Malaysia

Abstrak

Model yang sering digunakan untuk menganalisis migrasi penduduk di suatu wilayah adalah model dorong-tarik (push-pull factors dari Lee, 1995). Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi antara daerah asal dibandingkan dengan daerah tujuan terdapat perbedaan nilai kefaedahan wilayah yang tinggi sehingga dapat menimbulkan migrasi penduduk. Seorang cenderung melakukan migrasi apabila kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penilaian terhadap

daerah asal dari masing-masing individu di dalam masyarakat tersebut berbeda-beda. Jadi proses pengambilan keputusan untuk pindah dari masing-masing individu berbeda pula. Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan menjadi motivasi utama seseorang untuk melakukan migrasi.

Motif ekonomi menjadi alasan utama seseorang bermigrasi atau karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah asal dan daerah tujuan (Todaro, 1979). Todaro menyebut motif tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional, dimana migrasi mempunyai harapan yaitu harapan untuk memperoleh pekerjaan dan harapan untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi dari pendapatan di daerah asal. Biasanya keputusan ini terjadi pada orang-orang yang mengalami tekanan, seperti pertimbangan dalam negeri, kesempatan kerja yang terbatas, infrastruktur yang terbatas, tingkat pendidikan, keterbatasan teknologi dan komunikasi, strategi pembangunan atau kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan, keterbatasan alam fisik. Kesempatan kerja di daerah asal relatif sedikit. Tingkat pendapatan pun rendah. Karena itu, penduduk tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedua hal ini mengakibatkan tingkat migrasi penduduk menjadi tinggi. Banyak pekerja yang melakukan migrasi ke Malaysia dengan harapan dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada pendapatan di daerah asal.

Berdasarkan kerangka pemikiran neo klasik, migrasi dapat dilihat sebagai produk dari perbedaan tingkat upah satu dengan daerah lain. Dengan menggunakan kerangka ini maka faktor utama yang melatarbelakangi proses migrasi tenaga kerja ke daerah tujuan adalah faktor makro yang sering kali dilihat sebagai faktor daya tarik dan daya dorong (Teori Push And Pull Factors) yang dikemukakan oleh Lee (1995) yang dalam proses migrasi tersebut sangat selektif.

Faktor makro dalam bentuk daya tarik dan daya dorong tersebut terdiri dari berbagai variable, misalnya pasaran kerja yang terbatas di daerah asal dan yang cukup di daerah tujuan, perbedaan tingkat upah di kedua daerah tersebut, pemilikan tanah di daerah asal, ikatan kesukuan dan kekeluargaan, hubungan transportasi antara daerah tujuan dan daerah asal, akses terhadap berbagai fasilitas di daerah tujuan dan pengaruh faktor politik di daerah asal. Mitchel dalam Mantra (1995) mengungkapkan bahwa kekuatan sentrifugal (yang berperan sebagai pendorong) dan kekuatan sentripetal (faktor yang menarik migran untuk pindah) merupakan faktor penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan proses migrasi. Di samping itu faktor kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk aktivitas ekonomi yang memadai juga menjadi penyebab terjadinya proses arus migrasi ke luar daerah atau antar negara dalam jumlah besar (Lee, 1995). Dengan kata lain Teori Need and Stress (Mantra, 1995) mengatakan tiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan yang berupa kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi di daerah tempat tinggal mereka maka terjadilah tekanan atau stress. Dapat dikatakan pula bahwa faktor need and stress yang besar di daerah asal mendorong migran potensial untuk meninggalkan daerahnya ke daerah-daerah lain yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya.

Kata Kunci: model dorong-tarik, buruh, migrasi, Malaysia

1. Latar Belakang

Migrasi internasional pekerja terus berkembang dengan perkembangan aktivitas kehidupan ekonomi dan politik internasional, dan ketergantungan sosial ekonomi antar negara. Makin tinggi intensitas hubungan yang terjalin antar negara dalam berbagai kehidupan, makin tinggi saling ketergantungan antarnegara dan pada gilirannya makin meningkatkan arus migrasi dalam berbagai bentuk (Kitz dan Zlonik, 1992: Lohrman, 1989). Kenyataan ini dimungkinkan oleh makin terbukanya berbagai kesempatan kerja yang dapat dimasuki oleh pekerja yang dimaksud.

Kondisi tersebut didukung oleh munculnya blok-blok ekonomi regional yang menisbikan identitas negara pada faktor produksi termasuk tenaga kerja.

Selama beberapa dekade akhir abad XX, migrasi internasional pekerja hampir berkembang suatu pilihan alternatif bagi banyak migran potensial di berbagai negara. Pengalaman banyak negara di dunia menunjukkan bahwa penggunaan jasa pekerja internasional (tanpa dikotomi legal dan ilegal, *document* dan *undocument*) yang makin tinggi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai

kepentingan pembangunan (Tjokrowinoto, 1987). Di samping itu, penggunaan jasa pekerja internasional tersebut secara tradisional dapat juga dipandang sebagai salah satu bentuk redistribusi tenaga kerja sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang makin cepat.

Laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya angkatan kerja yang cukup tinggi negara Indonesia menjadi suatu persoalan utama, apalagi dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang amat cepat, yakni rata-rata 1,7 persen per tahun yang menempatkan Indonesia sebagai negara berjumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. Lapangan kerja yang tersedia tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat. Ketidakseimbangan antara peluang kerja dengan jumlah angkatan kerja ini dapat mengakibatkan ketatnya persaingan untuk memperoleh pekerjaan. Pencari kerja yang kalah bersaing karena berkualitas rendah terpaksa harus menjadi pengangguran. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau pengangguran di Indonesia diantaranya adalah pengangguran terbuka, dan selebihnya adalah setengah pengangguran. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja, bahkan terjadi penyempitan lapangan kerja sebagai akibat dari krisis ekonomi. Sempitnya lapangan kerja yang tersedia mendorong pencari kerja, khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), melakukan migrasi mencari hidup di negara lain dan tingginya penghasilan/gaji yang diperoleh juga menjadi daya dorong terjadinya migrasi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori klasik *push-pull* yang menjelaskan bahwa daya tarik di negara tujuan dan daya dorong di negara asal menyebabkan mobilitas penduduk untuk mencapai tujuannya (Lee, 1998, hlm 17).

Pada mulanya migrasi TKI ke luar negeri terjadi berdasarkan pada prakarsa dan upaya dari TKI itu sendiri. Semakin hari semakin banyak TKI yang tertarik untuk bermigrasi ke luar negeri untuk mencari kerja. Dampak positif dari kegiatan tersebut adalah sebagai upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, meningkatkan ketrampilan kerja dan mendatangkan keuntungan berupa naiknya devisa negara. Meskipun demikian pemerintah kurang memberikan penanganan yang serius terhadap pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri, serta mengaturnya dalam suatu arah kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Upaya

ini juga dimaksudkan untuk melindungi TKI tersebut dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbaikan proses pengiriman TKI tidak hanya melalui penerbitan berbagai regulasi ketenagakerjaan, namun yang paling dibutuhkan adalah bagaimana mengawasi dan melakukan tindakan pembersihan secara obyektif kepada berbagai oknum yang terlibat penyelewengan penempatan TKI.

Migrasi internasional di Indonesia didominasi oleh migrasi tenaga kerja ke luar negeri, walaupun terjadi pula migrasi tenaga kerja asing ke Indonesia namun jumlahnya belum signifikan. Tenaga kerja asing lebih banyak bekerja pada perusahaan-perusahaan multi nasional yang memang membutuhkan ketrampilan dan keahlian khusus yang kurang mampu dipenuhi oleh penduduk lokal. Sedangkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri hanya sekedar sebagai pekerja kasar dengan upah yang murah, hal ini berkaitan dengan terbatasnya peluang kerja di Indonesia dan tersedianya kesempatan kerja di luar negeri dengan penghasilan yang lebih baik. Tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah tenaga kerja yang melakukan migrasi tanpa dilengkapi dokumen yang cukup (migrasi ilegal). Namun demikian kita dapat menduga bahwa jumlah migran tanpa dokumen adalah dua kali lebih besar daripada yang berdokumen lengkap. Kompetensi para pekerja migran TKI berkorelasi dengan tingkat pendidikannya, kebanyakan TKI bekerja pada berbagai jenis pekerjaan antara lain pekerja penata laksana rumah tangga, buruh pabrik, dan pekerja perkebunan di Malaysia.

Tidak mengherankan kalau dengan tingkat pendidikan yang rendah, serta jumlah pekerja migran terbanyak adalah perempuan dapat menyebabkan tindak kekerasan lebih tinggi. Kasus-kasus yang timbul kebanyakan mulai terjadi dari dalam negeri yaitu berlangsung sejak saat pendaftaran menjadi calon TKI, proses penempatan, saat bekerja sebagai TKI, sampai dengan kembali ke desa asalnya masing-masing. Walaupun pemerintah Republik Indonesia telah membuat pengaturan perundangan mengenai prosedur bagi warga negaranya untuk menjadi TKI secara lebih baik sebagai bagian dari upaya perlindungan kepada mereka, namun prosedur ini oleh para calon TKI masih dirasakan berbelit-belit, memerlukan ongkos yang banyak, serta waktunya lama, sehingga para calon TKI dengan ketidaktahuannya terjebak menjadi TKI ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Banyaknya TKI ilegal diperkirakan hampir dua kali lipat jumlah TKI legal.

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, ditinjau dari jumlah dan pengaruhnya bagi kondisi ketenagakerjaan dalam negeri secara khusus belum menimbulkan dampak yang signifikan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar (jumlah TKI kurang lebih 1,5 % dari angkatan kerja di Indonesia). Namun bagi negara penerima, jika jumlah TKI relatif besar dibandingkan penduduk setempat, boleh jadi menimbulkan ketegangan politis, ekonomi, dan sosial. Hal ini tercermin antara lain dengan sebab-sebab diberlakukannya undang-undang keimigrasian yang baru di Malaysia. Keterbatasan peluang kerja di Indonesia serta adanya kesempatan kerja di Malaysia yang terbuka luas, menjadikan daya tarik yang cukup kuat bagi tenaga kerja Indonesia untuk menjadi TKI di Malaysia.

2. Kemiskinan di Indonesia

Berbicara soal migrasi internasional mungkin tidak terlalu menarik jika dilihat hanya pada tataran permukaan sebagai sebuah gejala perpindahan penduduk yang melibatkan aspek-aspek ruang dan waktu. Akan tetapi persoalan tersebut akan menjadi sebuah fenomena besar jika mengkaji substansi persoalan yang menyebabkan gejala tersebut muncul dan berkembang. Oleh karena itu, fenomena migrasi yang berlangsung khususnya dalam konteks global atau internasional tidak dapat dipahami hanya dengan memposisikan didalam terminologi negatif atau positif. Persoalan tersebut juga tidak dapat disederhanakan dengan menempatkan aktivitas migrasi ke dalam sistem ekonomi sederhana yang menemukannya di dalam suatu kontak keuntungan material yang menghasilkan atau memberikan tekanan pada perubahan-perubahan harga produksi.

Persoalan stereotip konseptual, migrasi selalu dipandang sebagai sebuah respon rasional atas kemiskinan di daerah asal. Realitas ini paling kurang mendapat pembenaran-pembenaran empirik di dalam berbagai kajian yang telah dilakukan terutama di negara-negara berkembang (Hugo, 1993; Mantra dkk, 2001; Meier, 1995; Todaro, 1995, 2000; Zlonik, 1992). Namun, kenyataan yang selalu tidak pernah terungkap adalah bagaimana sebuah aktivitas migrasi yang berlangsung antar daerah atau antar negara telah menciptakan perubahan-perubahan struktural yang

membawa sebuah wilayah ekonomi dan politik suatu negara ke tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Di samping itu, aktivitas migrasi yang terjadi tersebut juga telah mampu menarik aktivitas etno-ekonomi ke dalam wilayah-wilayah yang jauh lebih luas, dalam konteks politik, sosial maupun kultural. Aktivitas ini bahkan telah menciptakan pengaruh kuat pada pola hubungan global yang bersifat mutualisme antar negara-negara terkait.

Namun, kemiskinan yang melekat pada aktivitas migrasi tersebut nampaknya ikut memberikan warna di dalam perkembangan fenomena migrasi yang terjadi. Kondisi ini secara umum telah melemahkan posisi migran di dalam seluruh proses aktivitas pasar kerja, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Buruknya posisi tawar pekerja migran tersebut diperburuk lagi oleh kebijakan penempatan tenaga kerja internasional yang tidak memiliki dasar hukum cukup kuat untuk memberikan jaminan perlindungan kepada migran pekerja. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika aktivitas migrasi yang berlangsung terutama dari negara-negara berkembang tidak terkecuali dari Indonesia, bergerak tanpa mekanisme yang memungkinkan keterlibatan mereka di dalam kegiatan pasar kerja global terjamin secara politis maupun hukum.

Dalam konteks politik dalam negeri Malaysia, kehadiran pekerja asing sebenarnya merupakan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi ketakutan pemerintah Malaysia akan komunitas pekerja migran yang makin besar dikhawatirkan menjadi pesaing berat pekerja setempat. Hal ini memberikan implikasi langsung pada terjadinya tekanan pengangguran di level bawah struktur pasar kerja nasional Malaysia. Kenyataan yang ada adalah bahwa tingkat pengangguran di Malaysia pada tahun 2000 mencapai 2,8 persen. Kondisi ini dikhawatirkan akan jauh lebih besar jika tenaga kerja asing masuk ke Malaysia dalam jumlah yang makin besar, apalagi pada era dimana pasar bebas regional segera diberlakukan. Di sisi lain, secara ekonomi sesungguhnya kehadiran pekerja asing yang sebagian besar dari Indonesia telah memberikan keuntungan besar kepada pemerintah Malaysia. Penggunaan tenaga kerja asing yang relatif murah telah memberikan kontribusi besar pada tambahan *saving* dana pembangunan. Di samping itu, pekerja asing juga telah ikut berperan mempercepat transformasi pembangunan di semua lini pembangunan Malaysia. Hal ini menjadi dasar penting untuk melihat dan mengkaji kebijakan-kebijakan

ketenagakerjaan asing di Malaysia khususnya menyangkut peluang dan penghargaan yang lebih terbuka pada saat sekarang dan akan datang.

Realitas kehadiran pekerja Indonesia di Malaysia merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Hal ini mengingat bahwa aliran pekerja Indonesia terutama ke bagian selatan semenanjung Malaysia maupun ke Malaysia Timur sudah berlangsung turun temurun sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan secara rutin di luar kerangka politik. Pengetatan aturan keimigrasian yang dilakukan dibawah alasan stabilitas nasional Malaysia oleh karenanya merupakan sebuah reaksi dari ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan manajemen tenaga kerja yang transparan dan ketakutan berlebihan atas dominasi pekerja asing terutama di sektor-sektor riil. Jika dilihat lebih spesifik, kehadiran pekerja Indonesia sepanjang era krisis (1997-2002) telah memberikan sumbangan penting bagi berjalannya roda perekonomian Malaysia yang sebagiannya mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian.

Oleh karena itu, secara ekonomi hilangnya sebagian besar pekerja asing sebagai implikasi langsung dari kebijakan ketat yang diterapkan pemerintah Malaysia memberikan pukulan berat bagi perekonomian Malaysia paling kurang satu periode ke depan. Logikanya adalah pengusiran tenaga kerja asing menciptakan kekosongan-kekosongan tenaga kerja di lapisan terbawah sementara pekerja lokalpun enggan untuk mengisi sektor pekerjaan tersebut. Kondisi ini secara substansial merupakan ancaman bagi stagnasi pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah-wilayah negara bagian yang banyak memanfaatkan tenaga kerja asing, seperti Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Malaka dan negara-negara bagian di Malaysia Timur yang berada di bawah wilayah persekutuan Melayu.

Secara historis pembatasan masuk pekerja asing sebenarnya bukan hal baru bagi Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran keimigrasian bahkan secara tradisional telah dilakukan dan direstui oleh kelompok-kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan kehadiran pekerja terutama di sektor perkebunan dan pertanian. Akta keimigrasian Malaysia 1959/1963 yang diperbarui dengan Akta keimigrasian Agustus 2002 yang mengatur tentang pembatasan dan ijin tinggal warga asing di Malaysia, misalnya, merupakan salah satu penegasan aturan sebelumnya. Akta ini pula yang digunakan untuk mendakwa dan mengancam sebagian besar

pekerja untuk berhati-hati melakukan aktivitas di wilayah semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur khususnya.

Namun, faktanya adalah bahwa betapapun upaya pengetatan keimigrasian dilakukan, realitas kebutuhan pekerja yang sangat besar di lapisan bawah dalam struktur pasar kerja Malaysia menyebabkan aliran masuk migran sulit untuk dikendalikan. Di samping itu, ketimpangan pertumbuhan ekonomi regional antara negara-negara tujuan migrasi (seperti Malaysia) dengan negara asal migran menyebabkan aktivitas migrasi yang dilakukan hampir tidak mempertimbangkan resiko yang mungkin akan dihadapi sepanjang proses migrasi yang terjadi. Kemiskinan di daerah asal migran telah menjadi stigma yang menjadikan aktivitas migrasi seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, aktivitas tersebut mengandung resiko besar, tetapi di sisi yang lain juga ada harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di daerah asal. Sebuah pilihan aktivitas yang juga bersifat dilematis, berada diantara pilihan-pilihan ekonomi politis yang sama beratnya.

3. Migrasi Pekerja ke Malaysia

Iming-iming gaji yang tinggi serta kondisi sulitnya kerja di negeri sendiri menyebabkan tawaran pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia tak pernah surut peminat. Bahkan, sekalipun berbagai kasus penganiayaan terhadap TKI kerap terjadi, sebagian masyarakat tidak setuju jika pengiriman TKI dilarang. Penghasilan yang tinggi itulah yang menyebabkan orang rela bersusah payah bekerja di luar negeri. Pada kenyataannya, kesulitan mencari pekerjaan dengan gaji yang layak memang sudah persoalan nasional. Banyaknya pengangguran usia produktif karena sempitnya lapangan kerja formal. Proses seseorang untuk melakukan migrasi diawali dengan pengambilan keputusan, apakah akan melakukan migrasi atau tetap tinggal di daerah asal. Pengambilan keputusan ini sepenuhnya tergantung pada seorang/individu itu sendiri, sebab individu itu yang tahu tentang keadaan diri sendiri dan penilaiannya terhadap daerah yang akan dituju.

Individu dalam suatu masyarakat mempunyai kebutuhan tertentu untuk dapat dipenuhi. Apabila di suatu wilayah kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan terjadi tekanan. Intensitas tekanan dari seorang ini tergantung pada besar kecilnya kebutuhan yang dapat dipenuhi dimana mereka berada. Tekanan

pada seseorang akan mengakibatkan tegangan. Tinggi rendahnya tegangan yang dialaminya seseorang terhadap tekanan tertentu akan bervariasi, tergantung pada tingkat emosi dan toleransi seseorang terhadap tekanan tersebut. Tekanan dibagi dua, yaitu tekanan ekonomi dan tekanan sosial psikologis. Tekanan ekonomi dan sosial psikologi ini akan menimbulkan proses kontak langsung atau tidak langsung dengan daerah tujuan (mengetahui sendiri atau mendapat informasi dari orang lain tentang daerah tujuan), dan kemungkinan ada penghalang antara. Selanjutnya seseorang akan mengambil keputusan apakah akan tetap tinggal atau melakukan migrasi dengan alternatif menetap atau tidak (Mantra, 1981: 141-142).

Untuk mengetahui proses migrasi penduduk akan dilihat faktor-faktor apa yang mendorong penduduk melakukan migrasi. Keputusan seseorang untuk melakukan migrasi dipengaruhi

oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Menurut Todaro dan Jerry Stilkind (dalam Manning dan Effendi, 1985:19) bahwa faktor pendorong dan penarik yang paling dominan adalah motif ekonomi, yaitu kemandekan ekonomi di desa menyebabkan pertumbuhan penduduk tetap mencapai tingkat yang sangat tinggi. Pertambahan penduduk yang tinggi disertai pendapatan yang rendah telah memaksa makin banyak penduduk desa mencari jalan lain untuk meningkatkan taraf hidup.

Tabel 1
Alasan-alasan Bekerja di Malaysia Menurut Proses Migrasi

Proses Migrasi	Alasan Bekerja di Malaysia						Jumlah	
	1		2		3			
	N	%	N	%	N	%		
Legal	29	76,3	33	84,6	47	72,3	109	76,8
ilegal	9	23,7	6	15,4	18	27,7	33	23,2
Jumlah	33	100	39	100	6	100	142	100

Sumber: Data Prima

Keterangan :

Alasan Bekerja di Malaysia 1: Memenuhi Kebutuhan Hidup

Alasan Bekerja di Malaysia 2: Mencari modal

Alasan Bekerja di Malaysia 3: Kesempatan kerja di desa sulit.

Alasan yang mendorong pekerja melakukan migrasi ke negara lain paling banyak adalah sulitnya kesempatan kerja di desa, kemudian adalah alasan untuk mencari modal, seperti telah dikemukakan penduduk Kecamatan Purwodadi dengan struktur muda. Keadaan penduduk yang seperti ini akan berakibat pada semakin banyaknya angkatan kerja di daerah ini. Dengan demikian kesempatan kerja baik di sektor pertanian maupun non pertanian akan menjadi sempit. Karena kesempatan kerja yang ada relatif sedikit maka mereka mencari ke daerah lain.

Selanjutnya adalah alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di desa pendapatan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Ini dapat dilihat rata-rata pendapatan sebelum melakukan migrasi dalam satu bulan yang paling tinggi adalah Rp.587.500, 00 bagi yang bekerja di

bangunan. Yang paling rendah mempunyai rata-rata pendapatan Rp.287.500, 00 yakni mereka yang bekerja sebagai petani. Secara keseluruhan rata-rata pendapatan pekerja di daerah asal per bulan Rp.487.500,00. Sebanyak 39 orang responden di daerah asal dalam keadaan menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan pekerja adalah bagaimana upaya pekerja untuk memecahkan kesulitan-kesulitan di daerah asal. Mereka mencari pekerjaan ke daerah lain untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup.

Faktor penarik yang paling menonjol adalah penghasilan di daerah tujuan lebih besar. Ini dapat dilihat bahwa alasan bekerja di luar negeri adalah mencari modal. Pekerja yang menuju ke Malaysia paling banyak mempunyai alasan untuk mencari

modal di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena di daerah asal kebutuhan hidup dan mencari modal tidak dapat dicukupi. Penghasilan yang lebih besar di daerah tujuan merupakan harapan mereka, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Pekerja yang mencari modal di daerah asal sesudah melakukan migrasi internasional berjumlah 39 orang. Hal ini didasarkan pada persepsi subyektif, karena mereka belum memanfaatkan modalnya untuk berusaha, dan kesempatan kerja di daerah relatif sangat sedikit. Sejumlah 33 orang melakukan migrasi internasional dengan melalui proses ilegal atau *undocument*.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang lebih besar dan kesempatan kerja di Malaysia merupakan harapan utama bagi pekerja. Alasan-alasan pekerja bekerja di Malaysia ini hampir sama dengan penelitian di Flores Timur, Lombok Tengah dan pulau Bawean (Mantra, dkk, 1999). Demikian juga menurut Nasution (1977a), yang membuktikan bahwa alasan responden yang paling utama meninggalkan negara asal karena sukarnya memperoleh pekerjaan, dan karena keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Peluang kerja untuk para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri cukup besar. Bahkan gaji yang akan mereka terima cukup menggiurkan, sebab penghasilan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) saja dalam satu bulan bisa mencapai Rp.2, 5 juta, bahkan ada yang mencapai Rp.4 juta per bulan. Peluang dan gaji besar ini memang sangat menggiurkan TKI untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Bupati Purworejo H. Kelik Summrahadi S.Sos, MM, jumlah TKI pun tidak terbatas karena kebutuhan tenaga kerja itu masih cukup banyak. Masalah yang dialami TKI biasanya disebabkan karena yang bersangkutan lalai atau tidak mau mengurus paspornya. Biasanya, setelah habis kontrak, mereka tidak mau kembali dan berupaya mencari kesempatan pekerjaan yang lain. Mereka yang nasibnya kurang baik akan terkena razia. Pekerja yang memenuhi ketentuan dan persyaratan bekerja akan menetap di luar negeri tanpa masalah. Pekerja juga harus hati-hati dan waspada berbagai resiko juga perlu dipertimbangkan. (Harian *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 22 Mei 2007, hlm. 10).

Menyitir pendekatan neo klasik yang memandang aktivitas migrasi sebagai akibat atau respons terhadap terjadinya ketimpangan terutama

ekonomi, arus migrasi akan mengalir dari daerah-daerah atau negara-negara yang mengalami ketimpangan pertumbuhan yang menyolok, seperti daerah yang surplus tenaga kerja dengan tingkat upah yang rendah, ke daerah yang kekurangan tenaga kerja dengan upah dan kesempatan kerja yang lebih besar. Migran pekerja yang melakukan migrasi ke Malaysia mempunyai alasan bahwa kesempatan kerja di daerah asal relatif sulit, dan penghasilan yang mereka peroleh relatif rendah. Dengan bekerja ke Malaysia, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar bila dibandingkan dengan daerah asal, sehingga bisa dipergunakan untuk mencari modal demi kehidupan yang akan datang. Ketiga alasan mereka melakukan migrasi ke Malaysia bisa dikatakan sebagai alasan ekonomi. Di samping kesempatan kerja yang sulit, mereka tidak dapat mencari modal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup jika mereka hanya bekerja di daerah asal. Dengan demikian mereka memutuskan untuk melakukan migrasi ke Malaysia yang mereka anggap mempunyai banyak kesempatan kerja. Mereka juga berharap pendapatan yang mereka peroleh bisa dijadikan modal di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Salah satu informan mengatakan “*Saya senang bekerja di Malaysia karena ada penawaran pekerjaan, di sana pendapatan saya lebih besar dibandingkan di desa sehingga saya mencari uang untuk modal usaha, dan saya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya, kalau di desa mana bisa saya seperti ini*”. (wawancara dengan Bdmn, 22 November 1996).

4. Determinan Migrasi Internasional

Untuk melakukan migrasi dengan tujuan memaksimalkan faedah atau memaksimalkan pendapatan dibutuhkan modal dari individu tersebut, misalnya keterampilan. Tujuan memaksimalkan pendapatan diiringi dengan meminimalkan resiko dan hambatan (Starks, 1991). Perspektif neo klasik memberi tekanan pada ketidakseimbangan wilayah, ketimpangan ekonomi, misalnya perbedaan upah, perbedaan kesempatan kerja, ketimpangan distribusi lahan, ketimpangan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas sebagai determinan terjadinya arus migrasi. Terjadinya arus migrasi keluar dalam jumlah besar dari satu wilayah ke wilayah lain berpengaruh positif terhadap daerah asal karena dengan remitannya pelaku migrasi mampu memberi kontribusi pada peningkatan atau

perbaikan ekonomi (Wood, 1982: 310, Goss, 1995: 319).

Pendekatan neo klasik memandang aktivitas migrasi sebagai akibat atau respon terhadap terjadinya ketimpangan terutama dalam bidang ekonomi. Bertitik tolak dari teori ini, kondisi fisik di daerah penelitian yang tidak begitu menguntungkan (lahan kurang subur, musim kemarau sangat panjang, topografi kasar) merupakan faktor pendorong bagi penduduk untuk mencari nafkah di daerah lain, terutama di Malaysia. Di samping keadaan alam yang kurang menguntungkan, kesempatan kerja di daerah asal juga sangat terbatas, dan apabila ada, maka upah yang diterima sangat rendah.

Di Malaysia pasaran kerja banyak. Upah yang diterima pekerja juga lebih besar dibandingkan dengan upah uang mereka terima di Indonesia. Seperti yang dikemukakan responden: *“Saya pergi bekerja ke Malaysia karena di desa sulit sekali mendapatkan pekerjaan yang saya harapkan sesuai dengan pendidikan saya, walaupun ada pekerjaan pendapatan yang saya peroleh tidak dapat mencukupi kebutuhan saya,*

saya tamatan SLTA sehingga sangat sungkan untuk bekerja sebagai petani apalagi buruh tani, kalau di Malaysia saya bisa punya uang banyak karena pendapatan yang saya peroleh besar, dapat membeli tanah dan memperbaiki rumah di desa” (Wawancara dengan Gdk, 28 Januari 1996).

Di samping karena kesempatan kerja non pertanian sangat sulit diperoleh di desa, pendapatan yang diperoleh di desa sangat sedikit. Kalau mereka bekerja di luar negeri, mereka mendapatkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan yang diperoleh dengan bekerja di Malaysia dapat dilihat pada tabel 2. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja di Malaysia relatif lebih besar bila dibandingkan dengan di daerah asal. Dengan pekerjaan yang sama nominal gaji yang diperoleh relatif lebih besar. Contohnya jika di daerah asal seorang tukang bangunan dalam 1 hari bisa mendapatkan Rp. 45.000,00 maka kalau di Malaysia bila dikurs dengan Rupiah TKI bisa mendapatkan sekitar Rp.85.000,00

Tabel 2
Pendapatan di Malaysia (Rupiah per bulan) Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Rata-rata Pendapatan	Pendapatan Minimum	Pendapatan Maksimum	N	%
SD	Rp. 702.500,00	Rp.575.000,00	Rp. 830.000,00	34	24,0
SLTP	Rp. 850.000,00	Rp.775.000,00	Rp. 925.000,00	52	36,6
SLTA	Rp.1.012.500,00	Rp.800.000,00	Rp.1.225.000,00	56	39,4
Jumlah	Rp. 900.000,00	Rp.575.000,00	Rp.1.225.000,00	142	100

Sumber: Data Prima

Rata-rata pendapatan paling rendah per bulan di Malaysia diterima oleh pekerja yang berpendidikan SD, rata-rata pendapatan tertinggi diperoleh mereka yang berpendidikan SLTA. Di sini terlihat bahwa pendapatan di Malaysia jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan pekerja per bulan di daerah asal. Hasil penelitian Hugo (1993) menunjukkan bahwa tahun 1991 upah di Malaysia Rp.10.800,00/hari di Sarawak. Penelitian Purnami (1996) di Timur Tengah menunjukkan bahwa rata-rata gaji yang diterima oleh pekerja per bulan adalah Rp.345.345,00. Penelitian Herwanti (1996) menunjukkan pendapatan pekerja di Malaysia per bulan Rp.281.660,00. Ketiga penelitian tersebut membuktikan bahwa pendapatan di daerah tujuan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan di daerah asal. Hasil penelitian ini juga

membuktikan bahwa pendapatan di daerah tujuan lebih besar jika dibandingkan pendapatan di daerah asal.

Di daerah asal rata-rata pendapatan pekerja sebelum melakukan migrasi ke Malaysia sebulan secara keseluruhan sejumlah Rp.487.500, 00 di sini terbukti bahwa pendapatan di daerah asal jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan di Malaysia. Pekerja di Malaysia khususnya di Malaysia Timur, yang bekerja di beberapa bidang pekerjaan mendapatkan gaji paling sedikit 350 ringgit (dengan kurs 1 ringgit Malaysia menjadi Rp.2.300, 00) TKI yang bekerja di sektor bangunan biasanya mendapatkan gaji paling rendah rata-rata 15 ringgit Malaysia; tukang yang mahir akan mendapatkan lebih dari 25 ringgit Malaysia per hari di samping akan memperoleh uang lembur (*over time*) yang dihitung per jam.

Uang lembur biasanya berkisar antara 7-9 ringgit per jam.

Kesepakatan perlakuan terhadap pekerja domestik Indonesia di Malaysia akan diselesaikan. Kesepakatan ini secara substansial akan meningkatkan gaji pembantu rumah tangga (PRT) Indonesia di Malaysia, dan juga merinci sejumlah hal termasuk waktu jam untuk istirahat. Menaker telah mendesak Pemerintah Malaysia agar gaji PRT Indonesia di Malaysia minimal sebesar 500 ringgit (136 dolar AS) per bulan, termasuk istirahat pada setiap sepekan. Saat ini kebanyakan PRT Indonesia memperoleh gaji 300-400 ringgit per bulan, atau lebih rendah dibandingkan bayaran yang ditawarkan di Hong Kong dan Singapura. Para PRT itupun dipaksa bekerja 7 hari sepekan.

Di samping itu juga Menaker akan mengatur hak politik dan sipil, seperti akses komunikasi untuk tetap berhubungan dengan keluarga, dan hak memilih dalam pemilihan apapun di Indonesia. Para pekerja domestik, yang kebanyakan Muslim, juga akan memiliki hak untuk bebas melaksanakan kegiatan ibadah mereka. Kadang-kadang Indonesia mengirim pekerja domestik kepada keluarga non Muslim, dan kadang-kadang di keluarga tersebut hak menjalankan ibadah tidak dihormati dengan penuh.

5. Buruh Migran Indonesia di Malaysia

Malaysia mengandalkan buruh migran dari Indonesia, Bangladesh, Filipina, India dan Vietnam untuk memenuhi permintaan tenaga kerja. Orang Indonesia merupakan kelompok terbesar pekerja asing (83 persen) dan mempunyai sejarah panjang bekerja di Malaysia. Mereka mengisi kekurangan tenaga kerja sektoral yang diciptakan oleh kebijakan ekonomi Malaysia: dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi antara penduduk Melayu dan etnis Cina, Malaysia menetapkan Kebijakan Ekonomi Barunya pada tahun 1971 yang secara agresif mengejar industrialisasi berorientasi ekspor dan ekspansi sektor publik. Kebijakan-kebijakan ini berakibat pada pertumbuhan lowongan kerja di kota dan migrasi besar-besaran penduduk desa Malaysia ke kota. Pertumbuhan industri juga mengakibatkan peningkatan tenaga kerja dalam bidang manufaktur dan konstruksi yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri. Hingga awal tahun 1980-an, kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya permintaan atas pekerja rumah tangga di antara kelas menengah

yang tengah mengembang mempercepat gelombang masuknya buruh migran.

Menurut catatan pemerintah Indonesia, pada tahun 2002 kira-kira 480.000 warga Indonesia bermigrasi untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Para migran yang pergi ke Malaysia mendapat kerja di sektor rumah tangga (23 persen), manufaktur (36 persen), pertanian (26 persen) dan konstruksi (8 persen) (*Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan*). Dua juta penduduk Indonesia mungkin tengah bekerja di Malaysia, namun jumlah yang pasti sulit diverifikasi karena lebih dari setengahnya kemungkinan adalah pekerja tak berdokumen, tanpa izin atau visa kerja yang sah. Orang Indonesia di Malaysia merupakan arus migrasi yang terbesar di Asia dan secara global hanya dikalahkan oleh orang Meksiko yang masuk ke Amerika Serikat (Tjiptoherijanto, 1998). Selama berlakunya amnesti yang mengatur status keimigrasian pekerja tak berdokumen tahun 1992, lima puluh ribu pekerja tak berdokumen datang. Pada tahun 1997, 1,4 juta orang Indonesia yang bertempat tinggal di Malaysia menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum Indonesia, yang membuat Departemen Imigrasi Malaysia memperkirakan bahwa terdapat 1,9 juta orang Indonesia tinggal di Malaysia pada saat itu. Banyak migran memilih masuk Malaysia melalui rute tidak resmi karena migrasi melalui agen tenaga kerja resmi dapat berakibat keberangkatan yang lama dan memerlukan prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sementara pengurusan tidak resmi hanya memerlukan waktu beberapa hari. Namun demikian, terdapat resiko lebih besar untuk korupsi dan pelecehan dengan agen-agen tenaga kerja tanpa izin, serta kurangnya perlindungan jika pekerja menghadapi masalah dengan majikan mereka atau badan pemerintah yang berwenang.

Nasution (1997) mengatakan bahwa alasan utama pekerja melakukan migrasi ke Malaysia adalah karena di Indonesia tidak tersedia pekerjaan dan taraf penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi keperluan keluarga. Sebelum bekerja di Malaysia umumnya mereka bekerja di sektor informal seperti buruh tani, pekerja serabutan, penarik becak, dan nelayan. Mereka memilih Malaysia karena diarahkan *taikong* (*taikong* adalah sebutan untuk pihak yang memfasilitasi keberangkatan calon TKI tidak resmi ke Malaysia, perantara/calor yang mencarikan pekerjaan di Malaysia) juga keluarga, untuk bekerja dengan jenis pekerjaan tidak terampil. Hugo (1995) berpendapat bahwa migrasi antar

daerah maupun antar negara sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Hugo Graeme J (1993), “*Indonesia Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implication*”. South Asian Jurnal of Social Science, Vol. 21 No. 1.

Kitz, Mary M. And Hania Zlonik (1992). “*Global Interactions, Migration Systems, Processess and Policies*” dalam Mari M. Kritz, et al (eds). ***International Migration Systems, A Global Approach***. Oxford: Clarendon Press.

Lee, Everett (1998). ***Suatu Teori Migrasi***. (terjemahan Peter H). Yogyakarta: PPK UGM.

Mantra, Ida Bagoes, Kasto dan Abdul Haris (2001). “*Mobilitas Pekerja Perempuan Indonesia ke Arab Saudi: Masalah Kekerasan dan Perlindungan Hukum (Kasus di Kabupaten Cilacap)*”. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi, Direktorat Pembinaan dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Tidak di terbitkan.

Meir, Gerald M (1995). ***Leading Issues in Economic Development***. New York: Oxford University Press.

Tjiptoherijanto, Priyono (1998). ***International Migration: Process, System and Policy Issues***”, dalam ***Labour Migration in Indonesia: Policies and Practices***. Yogyakarta Population Studies Center Gadjah Mada University.

Tjokrowinoto, Moeljarto (1987). ***Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi***. Yogyakarta: Tara Wacana.

Todaro, Michael P (1995). ***Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*** (Edisi Indonesia). Jakarta: Erlangga.

Zlotnik, Hania (1992). “*Empirical Identification of International Migration Systems*” dalam Mary M. Kritz, Lin Leam Lim, Hania Zlotnik. ***International Migration Systems, A Global Approach***. Oxford: Clarendon Press.

***Dr. Anggraeni Primawati**

Memperoleh gelar doktor dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia dengan disertasi “Migrasi Internasional dan Perubahan Masyarakat Lokal Suatu Studi Mengenai Proses dan Dampak Mobilitas Warga Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah Ke Malaysia”. Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Padang dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tunas Nusantara Jakarta. Aktif melakukan beberapa kajian mengenai TKI di dalam dan di luar negeri, kajian mengenai otonomi khusus Papua, serta kajian koperasi dan UKM

Hp. : 08122737499

Email : angkyprima@yahoo.com

“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.”

**Soekarno,
pidato HUT Proklamasi 1963**